

PERAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Neddy Rafinaldy Halim¹

ABSTRACT

The community development is a part of community developing effort, which is an effort that is consciously and continuously carried out, aiming for a more positive and advance alteration in community, by means of developing the community's potential and changing the negative community behaviour right until the community can independently stand on their own. The community development can not be run partially. Instead, it has to be done camprehensively and the responsibility should be carried on the back of many parties, including the government, NGOs (Non-Government Organization), government agencies, private agencies, etc. In the era of openness and transparency, the roles of government nowadays and in the future in development are merely as the regulator, facilitator, dinamisator, stabilisator and stimulator. Those roles are emphasizing on the effort of independency that demands the participation, initiative and creativity of the community itself, without any further interference and intervention from the government, which might possibly put out the community effort to achieve independency. In other words, the strategy of community development should cover: (a) participation, (b) independency and (c) partnership.

Key words: *community development, participation, partnership*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh moral dan etikanya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pemerintahan yang kuat dan mampu menjalankan tugas untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan rakyatnya guna mewujudkan kesejahteraannya.

Dalam era otonomi daerah dan keterbukaan seperti saat ini, peran pemerintah di masa kini dan masa mendatang dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraannya adalah berfungsi sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan pelopor/stimulator, yang menekankan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam koridor persatuan Indonesia. Sebagai modernisator pemerintah berkewajiban membawa perubahan-perubahan ke

¹ Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM

arah pembaharuan masyarakat. Sebagai katalisator/fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Sebagai pelopor atau stimulator, pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk mengikuti contoh tersebut melalui tindakan nyata jika memang contoh tersebut bermanfaat.

Fungsi pemerintah tersebut menuntut adanya "peran serta masyarakat" secara aktif melalui upaya partisipasi, inisiatif dan kreatifitas. Pengertian 'peran serta masyarakat' dalam pembangunan adalah suatu proses pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui komunikasi dua arah secara terus menerus dalam rangka upaya mendesiminasi secara intensif sehingga diperoleh suatu pengertian masyarakat secara penuh dan utuh atas suatu proses pembangunan tersebut. dengan kata lain 'peran serta masyarakat' adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam 'perubahan sosial' yang memungkinkan masyarakat mendapatkan bagian keuntungan. Adapun tujuan dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah dalam rangka menghasilkan 'masukan dan persepsi' yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi permasalahan saat ini sejauh mana kemampuan masyarakat dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengambil kebijakan? Menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui upaya-upaya pengembangan masyarakat.

STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat, yaitu upaya yang dilakukan secara sadar dan terus menerus guna mengubah keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih maju melalui berbagai pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat (perilaku negatif) sampai masyarakat itu mampu mengatur dirinya sendiri (kemandirian). Pengembangan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara komprehensif yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak, pemerintah, NGO (lembaga swadaya masyarakat), BUMN/BUMS dll.

Konsep pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang lebih menekankan pada upaya "kemandirian", karena itu dalam pengembangan masyarakat diperlukan adanya peran aktif masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti partisipasi, inisiatif dan kreatifitas dalam pengembangan masyarakat harus lebih banyak datang dari masyarakat itu sendiri, sementara pemerintah pusat berfungsi sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan pelopor/stimulator tanpa ikut

campur atau intervensi terlampau jauh yang justru bisa mematikan upaya pengembangan yang mandiri.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan masyarakat merupakan tuntutan mutlak agar masyarakat dapat lebih berperan berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk maju dan berkembang melalui mekanisme keterlibatannya dalam proses pembangunan, seperti menyusun program-program pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (bottom up) yang memperlakukan masyarakat tidak hanya sebagai "sasaran" pembangunan tetapi juga sebagai "pelaku" pembangunan. Hal tersebut memberikan implikasi perlu adanya kontribusi, di samping adanya penuntutan akan keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

Kemandirian

Kemandirian menggambarkan adanya kemampuan dan potensi swadaya, dalam hal ini pemerintah secara bertahap mendorong penggalan potensi swadaya melalui mekanisme pengembangan masyarakat yang pada tahap awalnya dimulai atau didorong oleh inisiatif pemerintah, oleh pemerintah, untuk masyarakat, kemudian meningkat dari pemerintah, oleh masyarakat, untuk masyarakat; dan pada akhirnya mekanisme dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat;

Kemitraan

Kemitraan dalam upaya pengembangan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk tujuan peningkatan kompetensi dan kapasitas masyarakat khususnya mendukung keterlibatannya dalam proses pembangunan yang selanjutnya dapat memberikan implikasi pada: (a) terjaganya kesinambungan pembangunan, (b) terciptanya keselarasan berbagai kepentingan dan (c) sebagai instrumen untuk menghindari ketimpangan atau kesenjangan. Dalam hal ini diperlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dari "kemitraan" dalam pengembangan masyarakat, seperti : (a) saling melengkapi, (b) saling memperkuat, (c) saling membesarkan dan (d) saling menguntungkan.

PENUTUP

Kiranya kita semua sepakat bahwa mengembangkan masyarakat mengandung makna memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat/kelompok masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan eksternal yang akan merugikan dalam proses pembangunan; di samping juga

mengandung makna melindungi, membela dan berpihak pada yang lemah untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Peran pemerintah sebagai pengambil/penentu kebijakan dalam pengembangan masyarakat lebih bersifat sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan pelopor/stimulator dalam rangka :

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat guna optimalisasi keterlibatannya dalam proses pembangunan;
- b. Mempercepat proses pemerataan pembangunan;
- c. Melibatkan partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat secara nyata dalam setiap pelaksanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap produk-produk pembangunan sehingga terjaga pemeliharaannya;
- e. Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan budaya, karakter maupun potensi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo M. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasasmita G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Prijono OS, Pranarka AMW. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.